Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi Perdagangan Perempuan Dan Anak Untuk Eksplorasi Seksual Transnasional

Kosma Kaju Gae ^{1*}, Joko Sriwidodo ², Edis Saputra Hasibuan ³

¹²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Korespondensi : kosmas6000@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 30-1-2025

Direvisi : 17-2-2025

Disetujui : 30-3-2025

Diterbitkan : 5-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5524

Keywords : *Transnational Human Trafficking, Sexual Exploitation, Women and Children.*

Abstract : *This study discusses the issue of trafficking of women and children for transnational sexual exploitation, focusing on the challenges faced in law enforcement and the use of technological developments as one of the modes in TPPO. Although the Indonesian government has taken several steps to address this issue, such as investigating and prosecuting cases of human trafficking, the results show a decline in investigations and convictions over the past few years. The development of information technology has been utilized by criminals to expand their networks and recruit victims boldly, which further worsens the situation. In addition, low levels of education and access to information among the community also contribute to the vulnerability of individuals to fraud and make them easy to fall into human trafficking networks. This study emphasizes the importance of improving education and access to information as a strategy to combat human trafficking.*

Kata kunci : Perdagangan Orang Transnasional, Eksploitasi Seksual, Perempuan dan Anak

Abstrak : Penelitian ini membahas isu perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual transnasional, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai salah satu modus dalam TPPO. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah ini, seperti menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan orang, hasilnya menunjukkan penurunan dalam investigasi dan hukuman selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperluas jaringan dan merekrut korban secara daring, yang semakin memperburuk situasi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi di kalangan masyarakat juga berkontribusi pada kerentanan individu terhadap penipuan dan membuat mereka mudah untuk terjebak ke dalam jaringan perdagangan orang. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pendidikan dan akses informasi sebagai strategi untuk melawan perdagangan orang.

I. PENDAHULUAN

kejahatan yang dilakukan manusia semakin mudah dan sulit diawasi, karena semakin banyak yang berbasis daring. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukanlah kejahatan biasa tetapi bekerja secara terorganisir dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational crime*.¹

Transnasional crime atau kejahatan transnasional merujuk pada tindak kejahatan yang melibatkan pelaku dan kegiatan yang melintas batas negara, serta memiliki dampak yang signifikan di lebih dari satu negara. Kejahatan ini tidak hanya terbatas pada hukum domestik suatu negara, tetapi juga melibatkan koordinasi antar negara dalam penegakan hukum dan pencegahan. Jenis kejahatan ini bisa mencakup perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, terorisme, serta perdagangan manusia (*human trafficking*) yang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan merugikan. Kejahatan transnasional sering kali dilakukan oleh sindikat internasional yang memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam sistem hukum negara-negara yang terlibat.

Perdagangan orang menjadi salah satu cakupan dari transnasional crime, dimana perempuan dan anak menjadi salah satu topik perdagangan manusia yang menjadi perhatian utama di seluruh dunia khususnya Asia Tenggara. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), Perdagangan orang adalah tindakan mendapatkan orang dengan cara yang tidak benar seperti kekerasan, penipuan, atau tipu daya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Ini adalah kejahatan serius dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Setiap tahun, ribuan pria, wanita, dan anak-anak jatuh ke tangan para pedagang manusia, di negara mereka sendiri dan di luar negeri. Para korban dieksploitasi di restoran, pertanian, lokasi konstruksi, rumah bordil, pabrik, pasar, tambang, dan di rumah-rumah orang di mana saja.²

Selain itu, menurut Protokol Perdagangan Orang (*the Trafficking in Persons Protocol*), pada Pasal 3 Protokol tersebut mendefinisikan perdagangan orang sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman

¹ Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2020). Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 10(2), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40384>

² UNODC. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. United Nations Office on Drugs and Crime. Unodc.Org. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>

atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi melalui pelacuran orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, kerja rodi, atau pengambilan organ tubuh.³

Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan human trafficking atau perdagangan manusia sebagai sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.⁴

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Karena memang pada dasarnya negara Indonesia memiliki cita-cita negara untuk mensejahterakan dan melindungi warga negaranya dari segala jenis bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah perdagangan orang. Perdagangan orang memanglah salah satu kejahatan yang saat ini sedang dan masih marak dihadapi oleh negara di belahan dunia manapun, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 yang menjelaskan perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara, maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

³ Heintze, H.-J., & Lulf, C. (2017). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. *International Law and Transnational Organised Crime*, 150–168. <https://doi.org/10.1093/law/9780198733737.003.0008>

⁴ Atanasio Trivaldus Bambar. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *Unes Law Review*, 4(4), 488–501. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

tereksploitasi.⁵ Undang-undang tersebut merupakan salah satu dasar hukum yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan merupakan satu langkah kepastian bahwa Indonesia memiliki tujuan yang jelas guna memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Belakangan ini, pemberitaan tentang perdagangan manusia di Indonesia semakin intensif, baik di tingkat domestik maupun yang melibatkan lintas batas negara. Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak dalam industri seksual, baru belakangan ini menarik perhatian masyarakat melalui media massa. Peningkatan kasus perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir dapat dihubungkan dengan krisis ekonomi yang terjadi. Angka pengangguran di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, semakin tinggi, sementara biaya hidup terus meningkat. Berdasarkan berbagai kasus yang ditemukan, korban potensial dapat berasal dari berbagai kelompok, termasuk bayi yang masih dalam kandungan, anak-anak dari berbagai usia, serta perempuan dan laki-laki. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga berperan besar dalam membuat seseorang lebih rentan terhadap penipuan, yang pada gilirannya memperburuk masalah perdagangan manusia, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pendidikan sebagai upaya untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia menimbulkan keprihatinan yang mendalam.

Perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual adalah salah satu contoh kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan internasional yang luas. Kejahatan ini terjadi ketika individu, terutama perempuan dan anak-anak, diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual di berbagai negara. Para pelaku kejahatan ini sering memanfaatkan kemiskinan, ketidakberdayaan sosial, dan ketidakmampuan individu untuk mengakses informasi atau perlindungan hukum yang tepat. Sindikat perdagangan manusia biasanya bergerak melintasi batas negara, memindahkan korban dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi permintaan pasar ilegal terhadap eksploitasi seksual, baik itu dalam bentuk prostitusi, pornografi, atau bentuk lainnya. Keberadaan jalur perdagangan yang melintasi negara ini menunjukkan betapa perdagangan manusia tidak hanya terbatas pada satu wilayah atau sistem hukum, melainkan merupakan masalah global yang membutuhkan solusi lintas negara.⁶

⁵ Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

⁶ McCarthy, L. A. (2014). Human trafficking and the new slavery. *Annual Review of Law and Social Science*, 10, 221–242. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110413-030952>

Fenomena perdagangan perempuan dan kejahatan transnasional yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sangat penting untuk dibahas. Perdagangan manusia, khususnya perempuan, merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan perdagangan individu untuk tujuan-tujuan tertentu.⁷ Berdasarkan data yang diperoleh penulis menyatakan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang paling rentan dalam kasus perdagangan orang. Laporan terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa 97% korban perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2019-2023 adalah perempuan dan anak. Dimana hal ini didukung dengan laporan dari *International Organization for Migration* (IOM) tentang data perdagangan anak selama dua puluh tahun menunjukkan bahwa anak-anak berisiko lebih tinggi untuk diperdagangkan dibandingkan dengan orang dewasa, terutama jika mereka berasal dari daerah berpenghasilan rendah atau rawan bencana. Di sisi lain, perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan berbasis gender selama perjalanan migrasi mereka⁸.

Menurut KPPPA, Kasus perdagangan orang dipengaruhi oleh faktor penarik dan pendorong. Janji akan kehidupan yang lebih baik di negara lain sering menjadi motivasi bagi individu untuk bermigrasi dari tempat asalnya. Di sisi lain, faktor seperti terbatasnya kesempatan kerja dan kondisi geografis yang buruk akibat perubahan iklim mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asal mereka. Di Indonesia, menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa, jumlah kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan hingga 837 kasus atau 57% dari tahun sebelumnya yakni 2022. Dimana Listyo mengatakan bahwa: kejahatan TPPO di 2023 sebanyak 982 perkara atau meningkat 837 perkara dari 2022, yakni sebanyak 145 perkara. Sementara jumlah korban, juga mengalami kenaikan dari 668 orang di tahun 2022 menjadi 3.208 orang di tahun 2023. Atas temuan

⁷ Yordan Sinurat, H., & Dame Panjaitan, J. (2023). Legal Action Against The Crime Of Transitional Trafficking Of Women And Children. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2727–2734. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1058>

⁸ Anonim. (2024). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang*. Indonesia.Iom.Int. <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>

tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat untuk memberantas TPPO. Polri yang ditunjuk sebagai leading sector pemberantasan TPPO oleh Presiden Jokowi.⁹

Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kasus perdagangan orang dari tahun ke tahun, meskipun upaya pencegahan dan penindakan terus dilakukan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kejahatan transnasional ini masih menjadi tantangan serius bagi penegak hukum dan masyarakat. Mayoritas korban mengalami eksploitasi seksual, diikuti oleh eksploitasi kerja paksa. Peningkatan kasus perdagangan orang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memperluas jaringan dan merekrut korban secara daring. Dampak dari perdagangan orang tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

Menurut Laporan 2022 *Trafficking in Persons Report: Indonesia*, Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan manusia, meskipun telah berupaya melalui pemulangan pekerja migran, penyediaan layanan sosial bagi korban, serta peningkatan pendanaan untuk perlindungan korban dan saksi. Namun, upaya secara keseluruhan masih belum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Investigasi dan hukuman atas kejahatan ini terus menurun, sementara keterlibatan pejabat dalam perdagangan manusia masih menjadi perhatian yang belum ditangani. Kurangnya prosedur identifikasi korban yang sistematis serta layanan perlindungan yang belum memadai, khususnya bagi korban laki-laki, turut menjadi hambatan. Selain itu, pengawasan di sektor perikanan dan pekerja migran belum efektif, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih lemah. Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia tahun 2007 juga dinilai tidak sesuai dengan standar internasional karena mensyaratkan bukti kekuatan, penipuan, atau paksaan dalam kasus perdagangan seks anak. Akibatnya, Indonesia diturunkan ke Daftar Pantauan Tingkat 2.¹⁰

Pemerintah melaporkan telah menyelidiki 1.061 kasus perdagangan orang pada tahun 2023, dimana 370 kasus perdagangan seks, 603 kasus perdagangan tenaga kerja, dan 88 kasus perdagangan orang lainnya. Dibandingkan dengan penyelidikan terhadap 133 kasus perdagangan orang pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2023 lembaga penegak hukum melakukan penuntutan dengan UU PTPO tahun 2007 terhadap pelaku perdagangan orang yang tidak disebutkan jumlahnya dalam 706 kasus, dibandingkan

⁹ Opin. (2023). *Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023*. Tribatanews.Polri.Go.Id.<https://tribatanews.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/>

¹⁰ US Department of State. (2022). *2022 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. State.Gov. <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>

dengan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang yang tidak disebutkan jumlahnya dalam 223 kasus pada tahun 2022. Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku perdagangan orang dalam jumlah yang tidak disebutkan dalam 435 kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan putusan bersalah terhadap 217 pelaku di tahun 2022. Data penegakan hukum yang telah disampaikan oleh pemerintah terkait investigasi, penuntutan, dan putusan bersalah kemungkinan terdapat duplikasi dan kasus-kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Jaksa Penuntut Umum lebih cenderung menuntut kasus dengan UU PPMI tahun 2017, karena undang-undang tersebut memiliki tingkat beban pembuktian yang lebih rendah. Pemerintah melaporkan bahwa mereka telah menyelidiki setidaknya satu tersangka pelaku TPPO yang telah mengeksploitasi 17 ABK perikanan Indonesia dalam kasus perdagangan tenaga kerja.¹¹

Korupsi yang endemik dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam tindak pidana perdagangan orang, terutama di industri kelapa sawit, perikanan, dan ekstraktif, masih merupakan masalah besar yang menghambat penegakan hukum. LSM dan organisasi internasional menduga adanya keterlibatan pejabat dan praktik korupsi di perkebunan kelapa sawit, dan mencatat bahwa beberapa bupati mengoperasikan “penjara” yang berisikan orang-orang yang bekerja secara paksa di perkebunan. Persyaratan ketat yang diterapkan oleh pemerintah bagi organisasi-organisasi untuk mengunjungi perkebunan kelapa sawit telah menghambat upaya LSM dan organisasi internasional untuk mengetahui kondisi tenaga kerja.

Dalam merespon beragam jenis dan modus TPPO, pemerintah menegaskan komitmen melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan dikuatkan dengan penerbitan beberapa aturan turunan sebagai pelaksanaan atau operasionalisasinya di lapangan. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) di Pusat dan Daerah yang diimplementasikan melalui rencana aksi dan penerbitan berbagai standar operasional prosedur terkait pencegahan dan penanganan TPPO.

GT PP TPPO Pusat terdiri dari 27 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 6 sub Gugus Tugas yaitu Sub Gugus Tugas Pencegahan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, serta

¹¹ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2024). *Laporan Perdagangan Manusia 2024: Indonesia (Tingkat 2)*. Id.Usembassy.Gov. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>

Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama. Dan GT PP TPPO daerah juga sudah terbentuk di 32 Provinsi dan 245 Kabupaten/Kota.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.¹² Dengan menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan kasus dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian penulis.

III. PEMBAHASAN

A. Pola, Modus Operandi dan Jaringan Perdagangan Orang

Tindak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saat ini, terjadi perubahan dalam modus operandi dan pola jaringan pelaku TPPO. Dengan kemajuan teknologi, pelaku TPPO kini lebih mudah melaksanakan aksinya. Di era digital yang terus berkembang, media sosial telah mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi secara drastis. Platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, berbagi informasi, mengungkapkan pendapat, serta menjalin hubungan sosial dengan sangat cepat. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal komunikasi.

Namun, di balik kemajuan teknologi dan keuntungan yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat dampak negatif yang lebih kompleks. Salah satu masalah yang semakin mencuat adalah meningkatnya kasus penipuan dan perdagangan manusia, yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama. Media sosial memberikan kesempatan bagi penipu untuk menciptakan identitas palsu, memanipulasi informasi, dan menipu orang dengan berbagai cara. Mereka dapat mengirimkan pesan palsu, membuat profil palsu, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan dengan tujuan untuk memperdaya korban. Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan untuk menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat, penipuan melalui media sosial dapat menyebar dengan sangat cepat.

¹² Soerjono Soekanto, S. M. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sering kali, pengguna media sosial di Indonesia dengan terbuka membagikan informasi pribadi mereka, seperti alamat rumah, tanggal lahir, nomor telepon, dan hubungan keluarga. Fenomena ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan privasi dan data pribadi sebagai bagian dari hak individu.¹³ Akibatnya, orang lain dapat dengan mudah mengakses informasi pribadi ini dan memanfaatkannya untuk tujuan penipuan. Selain itu, media sosial juga telah menjadi sarana untuk praktik perdagangan manusia yang tidak manusiawi. Perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, menyimpan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengeksploitasi posisi rentan, dengan tujuan mendapatkan persetujuan individu tersebut untuk tujuan eksploitasi, baik dalam negeri maupun lintas negara.¹⁴

Seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes pada Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO mengatakan bahwa pergeseran modus operandi TPPO yang saat ini tidak hanya terkait dengan pekerja migran ke luar negeri tetapi juga telah berkembang modus-modus baru, seperti pengantin pesanan dan “jual teman” di kalangan remaja, siswa, mahasiswa dan lain-lain. Pola jaringan pelaku TPPO juga mengalami perkembangan, dimana korban banyak yang beralih menjadi pelaku TPPO. Mirisnya, orang tua atau keluarga yang seharusnya sebagai pelindung berubah menjadi pelaku TPPO. Negara ASEAN yang semula menjadi daerah tujuan, saat ini juga berkembang menjadi daerah transit karena kemudahan memasuki negara tersebut, untuk menuju negara-negara yang seharusnya terlarang (moratorium).¹⁵

Pada intinya jaringan perdagangan orang transnasional, khususnya yang terlibat dalam eksploitasi seksual umumnya memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan terdiri dari berbagai lapisan yang saling terhubung. Jaringan ini sering kali dibandung dengan hierarki yang memisahkan peran dan tanggung jawab antara

¹³ Novia Andriani, & Andi Aina Ilmih. (2024). Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 36–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>

¹⁴ Mufidah Ch. (2011). *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*. Malang Press.

¹⁵ Kemen PPPA. (2023). *Modus dan Pola Jaringan TPPO Baru, Kemen PPPA Himbau Masyarakat Waspada*. Kemenpppa.Go.Id2. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MTkwNg>

berbagai tingkat anggota, dimana berdasarkan data yang ada struktur tersebut mencakup:

- a. Penyelenggara (*Mastermind/Kingpin*): Orang yang menjadi pemimpin dari jaringan TPPO, biasanya pemimpin ini beroperasi di luar negeri dan mengatur semua aktivitas utama. Mereka mengontrol operasi secara keseluruhan, mengatur hubungan dengan pihak-pihak di luar jaringan, serta menetapkan arah strategis dan tujuan jaringan. Mereka sering kali tidak terlibat langsung dalam pengambilan korban, namun mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan-keputusan penting.
- b. Rekrutmen: Anggota yang bertanggung jawab untuk merekrut korban, biasanya dengan menggunakan janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Rekrutmen ini bisa dilakukan melalui saluran-saluran yang sah, seperti agensi tenaga kerja, atau dengan cara yang lebih ilegal seperti perkenalan secara langsung atau melalui media sosial.
- c. Pengangkut: Setelah korban berhasil direkrut, ada pihak-pihak yang bertugas untuk mengangkut korban, sering kali melibatkan perjalanan lintas negara atau antar wilayah. Mereka bisa bekerja sama dengan individu atau kelompok lain yang mengurus pengurusan dokumen palsu dan jalur transportasi ilegal.
- d. Eksploitasi: Setelah korban sampai di lokasi yang dituju, mereka dieksploitasi dalam bentuk prostitusi, pornografi, atau perbudakan seksual lainnya. Kelompok ini sering bekerja di bawah kendali pelaku yang lebih rendah, seperti “pengurus rumah bordil” atau “pengendali” yang mengatur aktivitas seksual korban.

Jaringan perdagangan manusia transnasional sangat tergantung pada hubungan antarnegara dan sering memanfaatkan celah hukum atau kelemahan dalam penegakan hukum di negara asal maupun tujuan untuk beroperasi dengan lancar. Salah satu contoh fenomena ini adalah penipuan rekrutmen pekerjaan palsu yang tersebar melalui media sosial. Korban, yang sering kali berharap dapat memperbaiki kondisi hidup mereka dengan bekerja di luar negeri, akhirnya tertipu oleh janji pekerjaan yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, perdagangan manusia sering kali dikaitkan dengan eksploitasi seksual yang dipaksakan oleh pelaku. Korban dipaksa untuk memenuhi keinginan pelaku melalui ancaman kekerasan dan berbagai bentuk paksaan. Fenomena ini menciptakan perbudakan modern yang merusak kebebasan dan martabat individu. Secara umum, ketidaksetaraan gender menciptakan struktur

sosial yang memandang kelompok pria sebagai lebih tinggi dan dominan dibandingkan perempuan, menghasilkan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Akibatnya, perempuan sering kali menjadi korban dalam situasi ini.

Perdagangan manusia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi pemicu utama dari praktik perdagangan manusia. Kemiskinan adalah situasi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena kebutuhan akan uang, mereka rentan terjerat dalam situasi perdagangan manusia. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang buruk rentan menjadi korban perdagangan manusia karena mereka mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

B. Penggunaan teknologi dan komunikasi modern dalam perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, terutama di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, serta meningkatnya arus globalisasi, telah menghapuskan batasan antarnegara. Hal ini memungkinkan perpindahan orang atau barang antarnegara dilakukan dengan cepat dan mudah. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem politik dunia, menciptakan kompetisi antarnegara dalam merebutkan pengaruh di tingkat nasional, regional, dan global. Kondisi ini sering kali memicu perebutan kekuasaan, yang berujung pada perubahan situasi keamanan dunia, dengan munculnya isu-isu keamanan baru.

Pada masa lalu, isu keamanan tradisional yang berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi, seperti pengaruh kekuatan blok Barat dan Timur, menjadi perhatian utama. Dunia saat itu sangat khawatir tentang pengembangan kekuatan militer, senjata strategis, dan hegemoni. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, meskipun banyak membawa dampak positif bagi umat manusia, juga muncul dampak negatif yang dapat merugikan individu, masyarakat, bahkan negara. Hal ini membuka peluang bagi orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi atau kelompok, meskipun dampaknya merugikan pihak lain.

Dampak dari globalisasi dan semakin eratnya interdependensi antarnegara telah menghilangkan batasan dalam interaksi antarbangsa, menciptakan peluang untuk kemajuan dan kesejahteraan. Namun, dampak negatifnya adalah munculnya

berbagai jenis kejahatan modern yang tidak hanya bersifat domestik atau nasional, tetapi juga lintas negara dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir. Kejahatan yang berkembang menjadi lintas negara terorganisir ini sangat meresahkan banyak negara, karena keorganisasiannya yang sangat canggih dan motif yang bersifat multidimensi, baik ekonomis, politis, maupun kombinasi keduanya. Faktor-faktor seperti keuntungan ekonomi yang besar, ketidakadaan hukum yang mengatur, serta kemajuan teknologi menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan lintas negara terorganisir. Oleh karena itu, kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang memerlukan penanggulangan yang juga luar biasa, melalui kerja sama bilateral dan transnasional dalam bentuk kerja sama antar negara baik secara multilateral, regional maupun internasional.¹⁶

Tak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Melalui hukum internasional, yang dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu-isu global mulai dari masalah-masalah kemiskinan, sosial ekonomi, keamanan, perlucutan senjata, HAM, lingkungan hidup sampai pada terorisme. Tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula dicapai perdamaian dan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan umat manusia.

Perdagangan manusia saat ini menjadi perhatian global yang mendalam, khususnya menyangkut pada korban yaitu perempuan dan anak, mengingat tingkat aktivitasnya yang terus meningkat. Terutama, perdagangan manusia lintas negara menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan, dengan korban yang berasal dari berbagai belahan dunia. Sayangnya, kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia adalah individu yang kurang informasi, terutama mengenai perkembangan teknologi, termasuk media elektronik.

¹⁶ Efitia Ayu, M. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5>

Media sosial telah menjadi sarana yang sangat efektif bagi pelaku perdagangan manusia untuk memanipulasi dan menjebak korban mereka. Para pelaku memanfaatkan media sosial dengan cara menyamar sebagai peluang atau hadiah menggiurkan. Salah satu contoh yang menggambarkan fenomena ini adalah penipuan rekrutmen pekerjaan palsu yang tersebar luas di media sosial.¹⁷ Dimana para pelaku memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki korban untuk melancarkan aksi-aksi mereka untuk merekrut korban secara signifikan. Dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak, dimana diantaranya adalah karena kemiskinan, sosial dan budaya, pendidikan yang rendah, perkawinan usia dini, permintaan yang tinggi, dan lain sebagainya.¹⁸ Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Kemiskinan

Tingkat ekonomi yang rendah sering kali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan pelacuran dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Penduduk miskin tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk mencari sumber penghidupan, tetapi mereka juga hanya memiliki sebagian kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan yang menekan dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi yang demikian sering kali membuat banyak perempuan memilih untuk melakukan migrasi.¹⁹ Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah tujuan dan keinginan untuk memperbaiki nasib, mereka justru menghadapi risiko untuk diperdagangkan. Ketimpangan ekonomi ini menjadikan perbedaan yang mencolok antara negara kaya dan negara miskin untuk menciptakan peluang bagi para pelaku untuk mengeksploitasi orang-orang yang rentan. Tekanan hutang piutang juga menjadi faktor penting dalam pembahasan ini, dimana hutang yang tinggi menyebabkan seseorang

¹⁷ Novindah Kurniadi, H. Q. (2021). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 452–466.

¹⁸ Saragih, H. M. (2019). Kebijakan Penanganan Kasus Human Trafficking di Ukraina Melalui Peran Internasional Organization For Migration. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 8(1), 54–68.

¹⁹ Hebron Yordan Sinurat, J. D. P. (2023). Legal Action Against The Crime Of Transitional Trafficking Of Women And Children. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2727–2734.

memanfaatkan kelemahan perempuan dan anak untuk memberi tawaran bekerja di luar negeri yang kemudian berujung pada eksploitasi secara seksual.

b. Faktor Sosial Budaya sebagai landasan Perdagangan Orang

Faktor sosial budaya berperan sebagai landasan yang kokoh dalam memicu dan memperparah masalah perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Norma-norma, nilai-nilai, dan praktik sosial budaya yang berlaku di suatu masyarakat dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan eksploitasi terjadi secara sistematis. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan gender. Dalam banyak masyarakat, perempuan masih dipandang sebagai warga kelas dua dan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Hal ini membuat mereka lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia. Norma patriarki yang kuat, di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar, juga melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.²⁰

Perkawinan anak merupakan contoh lain dari bagaimana norma sosial budaya dapat berkontribusi pada perdagangan manusia. Perempuan yang dinikahkan pada usia dini sering kali kehilangan kendali atas hidup mereka dan lebih mudah menjadi korban eksploitasi seksual. Selain itu, sistem kasta atau kelas sosial yang kaku juga dapat menjadi faktor pendorong. Kelompok minoritas atau kelas bawah sering kali menjadi sasaran perdagangan manusia karena dianggap memiliki nilai sosial yang rendah dan lebih mudah dieksploitasi. Norma budaya yang merendahkan perempuan juga berperan penting. Pandangan bahwa perempuan adalah objek seksual atau bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Kurangnya pendidikan juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Perempuan yang kurang berpendidikan cenderung memiliki kesadaran yang rendah tentang hak-hak mereka dan lebih mudah dimanipulasi oleh para pelaku perdagangan manusia.

Korban perdagangan manusia sering kali mengalami stigma sosial yang kuat. Mereka sering kali dianggap sebagai penyebab masalah mereka sendiri, atau bahkan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Stigma ini membuat mereka enggan

²⁰ Kusuma, R., I Hamzah, A. S., Husni, L., & Asyhadie, Z. (2020). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>

melaporkan kasus yang mereka alami dan mencari bantuan. Akibatnya, banyak korban yang terus hidup dalam penderitaan dan tidak mendapatkan keadilan.

c. Tingkat pendidikan yang rendah,

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak dan perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia. Ini dapat dipahami mengingat dalam komunitas yang mengedepankan nilai-nilai patriarki, anak perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, dan anak laki-laki yang diutamakan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calon yang menjanjikan pekerjaan yang “baik” dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran. Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan keterbatasan akses mereka terhadap informasi dan peluang dan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri.

Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki lebih sedikit keahlian daripada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kesempatan kerja yang semakin sedikit sehingga akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan iming-iming bisa cepat kaya, orang-orang dengan situasi seperti ini dapat mudah untuk direkrut dan dapat menjadi korban perdagangan manusia.

d. Faktor permintaan yang tinggi

Faktor permintaan dalam tindak pidana perdagangan perempuan dan anak merupakan elemen penting yang berkontribusi pada berkembangnya praktik kejahatan ini. Permintaan di sini merujuk pada kebutuhan atau permintaan dari pasar terhadap tenaga kerja, seks, atau eksploitasi lainnya yang melibatkan perempuan dan anak. Permintaan ini dapat berasal dari berbagai sektor, baik itu industri hiburan, prostitusi, atau pekerjaan rumah tangga, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk meraih keuntungan finansial.

Permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja merupakan faktor lainnya yang menjadikan perdagangan orang menjadi semakin marak, dimana tenaga kerja yang murah, jasa seksual dan produk-produk yang dihasilkan melalui eksploitasi merupakan salah satu faktor. Permintaan ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan, sehingga mereka termotivasi untuk terus mencari korban baru.

Salah satu faktor permintaan terbesar yang mendorong perdagangan manusia adalah industri seks. Dalam banyak kasus, pelaku perdagangan manusia memanfaatkan permintaan yang tinggi untuk seks komersial, baik yang terjadi dalam negeri maupun lintas negara. Peningkatan permintaan terhadap industri seks, baik di kalangan wisatawan maupun masyarakat lokal, menciptakan pasar yang menguntungkan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia. Pasar ini kemudian mengarah pada eksploitasi perempuan dan anak-anak, yang sering kali dipaksa untuk bekerja di tempat-tempat prostitusi atau untuk melayani klien dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi.

Selain itu, permintaan akan tenaga kerja murah di sektor-sektor tertentu juga menjadi salah satu pendorong perdagangan perempuan dan anak. Industri seperti pertanian, perikanan, dan pekerjaan rumah tangga sering kali membutuhkan tenaga kerja yang murah dan mudah dipengaruhi, sehingga menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran utama. Dalam konteks ini, mereka sering kali dibujuk dengan janji pekerjaan yang lebih baik, namun akhirnya dipaksa bekerja dalam kondisi yang buruk dan tidak manusiawi, tanpa gaji yang layak, serta sering mengalami kekerasan fisik maupun seksual.

Permintaan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, seperti ketidaksetaraan gender yang meluas dan pandangan yang mendiskriminasi perempuan dan anak. Dalam masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai objek seksual atau pekerja rumah tangga semata, permintaan terhadap eksploitasi perempuan dan anak menjadi lebih kuat. Stereotip gender ini menyebabkan ketidakberdayaan perempuan dan anak-anak, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang.

Terakhir, faktor permintaan juga dapat muncul dari masyarakat internasional, terutama dengan adanya praktik wisata seks yang melibatkan perempuan dan anak dari negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Wisatawan dari negara maju sering mencari destinasi di negara-negara berkembang yang memiliki regulasi lemah terhadap perdagangan orang. Hal ini menciptakan pasar global yang menguntungkan bagi jaringan perdagangan orang, yang memanfaatkan perbedaan kondisi ekonomi antarnegara untuk memenuhi permintaan ini.

Secara keseluruhan, faktor permintaan ini menunjukkan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan dan kesulitan hidup,

tetapi juga oleh adanya pasar yang membutuhkan mereka sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi. Menanggulangi permintaan ini memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk pendidikan, perubahan sosial, dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi kebutuhan akan eksploitasi manusia.

IV. KESIMPULAN

Perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual transnasional merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Meskipun ada upaya yang dilakukan, seperti penyelidikan dan penuntutan kasus, hasil yang diperoleh masih jauh dari memadai. Keterlibatan pejabat pemerintah dalam kejahatan ini dan korupsi yang endemik menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi pelaku untuk merekrut korban dengan lebih mudah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif, termasuk peningkatan pendidikan dan akses informasi, untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak individu.

V. SARAN

Untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual transnasional, diperlukan peningkatan penegakan hukum dengan memperbarui undang-undang dan menindak tegas pejabat yang terlibat dalam kejahatan ini. Prosedur identifikasi korban harus diperkuat, dengan fokus pada kelompok rentan, serta meningkatkan layanan perlindungan yang lebih spesifik bagi korban. Selain itu pemerintah juga harus memanfaatkan teknologi informasi guna mendeteksi perekrutan korban melalui media sosial. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak individu khususnya perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2024). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang*. Indonesia.Iom.Int. <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>
- Atanasio Trivaldus Bambar. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *Unes Law Review*, 4(4), 488–501. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

- Efita Ayu, M. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5>
- Hebron Yordan Sinurat, J. D. P. (2023). Legal Action Against The Crime Of Transitional Trafficking Of Women And Children. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2727–2734.
- Heintze, H.-J., & Lulf, C. (2017). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. *International Law and Transnational Organised Crime*, 150–168. <https://doi.org/10.1093/law/9780198733737.003.0008>
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2024). *Laporan Perdagangan Manusia 2024: Indonesia (Tingkat 2)*. Id.Usembassy.Gov. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Kemen PPPA. (2023). *Modus dan Pola Jaringan TPPO Baru, Kemen PPPA Himbau Masyarakat Waspada*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MTkwNg==>
- Kusuma, R., I Hamzah, A. S., Husni, L., & Asyhadie, Z. (2020). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>
- McCarthy, L. A. (2014). Human trafficking and the new slavery. *Annual Review of Law and Social Science*, 10, 221–242. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110413-030952>
- Mufidah Ch. (2011). *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*. Malang Press.
- Novia Andriani, & Andi Aina Ilmih. (2024). Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 36–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>
- Novindah Kurniadi, H. Q. (2021). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 452–466.
- Opin. (2023). *Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023*. Tribatanews.Polri.Go.Id. <https://tribatanews.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982->

- kasus-tppo-di-sepanjang-2023/
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Saragih, H. M. (2019). Kebijakan Penanganan Kasus Human Trafficking di Ukraina Melalui Peran Internasional Organization For Migration. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 8(1), 54–68.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- UNODC. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. United Nations Office on Drugs and Crime. Unodc.Org. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>
- US Department of State. (2022). *2022 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. State.Gov. <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>
- Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2020). Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 10(2), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40384>
- Yordan Sinurat, H., & Dame Panjaitan, J. (2023). Legal Action Against The Crime Of Transitional Trafficking Of Women And Children. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2727–2734. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1058>